

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian negara berkembang (Nakku et al., 2020; Prasannath et al., 2024). UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang (Chaithanapat et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, World Bank (2025) menegaskan bahwa UMKM juga memegang peranan penting dalam diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta pengurangan kemiskinan di negara-negara tersebut.

Di Indonesia, UMKM mampu menyumbang sekitar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Dengan mendominasi 99% unit usaha nasional (Kementerian UMKM, 2024), UMKM berada dalam kerangka kebijakan pengembangan tahun 2025-2029 yang berfokus pada pemberdayaan usaha melalui digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, dan penguatan ekosistem bisnis untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan (Kementerian UMKM, 2025). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Berbagai program strategis telah digulirkan, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada tahun

2025 sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha mikro (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Struktur UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang mencapai 99,71% dari total unit usaha, sementara usaha kecil dan menengah masing-masing hanya sebesar 0,24% dan 0,05% (Kementerian UMKM, 2024). Komposisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang struktural dalam ekosistem UMKM nasional. Dominasi usaha mikro yang sangat tinggi mengindikasikan rendahnya mobilitas vertikal usaha menuju skala yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pertumbuhan jumlah unit usaha mikro belum diikuti oleh transformasi struktural yang signifikan ke kategori usaha kecil maupun menengah.

Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas, daya saing, dan kinerja usaha. Banyak usaha mikro tetap berada pada skala yang stagnan dalam jangka waktu panjang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan UMKM bukan lagi terletak pada kuantitas, tetapi pada kualitas dan kinerja usaha. Oleh karena itu, peningkatan kinerja usaha mikro menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada pelaku usaha secara individual, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Banyak usaha mikro bertahan dalam skala yang stagnan pada jangka waktu yang panjang tanpa mengalami peningkatan kapasitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses naik kelas masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan manajerial. Dalam praktiknya, sebagian besar usaha mikro beroperasi dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan berkembang baik karena

dorongan kebutuhan ekonomi (*necessity driven*) maupun pemanfaatan peluang usaha (*opportunity driven*) (Prasannath et al., 2024). Namun demikian, berbagai kendala struktural masih membatasi perkembangan usaha di Indonesia, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, minimnya adopsi teknologi, serta lemahnya kemampuan inovasi (Maksum et al., 2020). Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan usaha mikro sulit untuk meningkatkan skala operasional dan cenderung bertahan pada sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah.

Dominannya pelaku usaha pada kategori usaha mikro berimplikasi pada terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan (Kementerian UMKM, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kinerja usaha mikro menjadi isu strategis yang tidak hanya akan berdampak pada keberlanjutan usaha secara individual, tetapi juga memiliki konsekuensi sistemik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan nasional.

Dalam upaya memahami faktor internal yang dapat memengaruhi kinerja usaha mikro, orientasi kewirausahaan menjadi salah satu konsep kunci dalam literatur kewirausahaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan dipandang sebagai faktor strategis yang berperan dalam meningkatkan kinerja usaha (Adam et al., 2024; Hernández-Linares et al., 2020; Kusa et al., 2021). Konsep ini merepresentasikan pola perilaku usaha yang ditandai oleh tingkat inovasi, keberanian dalam pengambilan risiko, serta sikap proaktif dalam merespons dinamika persaingan (Susanto et al., 2023).

Orientasi kewirausahaan tidak hanya merefleksikan sikap dan perilaku inovatif pelaku usaha, tetapi juga menjadi fondasi strategis yang memungkinkan suatu usaha dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Peningkatan kinerja UMKM sangat bergantung pada sejauh mana dimensi-dimensi orientasi kewirausahaan dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif oleh pelaku usaha (Adam et al., 2024). Tanpa orientasi kewirausahaan yang kuat, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam menciptakan keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja usahanya, khususnya pada sektor UMKM (Iqbal et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, urgensi kajian mengenai orientasi kewirausahaan pada UMKM menjadi semakin penting mengingat karakteristik tantangan yang dihadapi relatif kompleks dan spesifik (Adam et al., 2024). Keterbatasan dalam inovasi, rendahnya sikap proaktif, serta keengganan mengambil risiko strategis menghambat kemampuan UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kinerja usahanya (Sari et al., 2023). Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka kontribusi UMKM terhadap PDB nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai orientasi kewirausahaan menjadi sangat relevan dalam rangka memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional (Adam et al., 2024).

Meskipun banyak studi terdahulu yang menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha, namun hasil penelitian mengenai orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha belum

menunjukkan konsistensi. Sejumlah studi menemukan bahwa orientasi kewirausahaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha atau pengaruhnya sangat bergantung pada kondisi tertentu (Onwe et al., 2020; Pulka et al., 2021). Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha tidak bersifat universal dan memerlukan faktor pendukung lain.

Dalam konteks tersebut, kebijakan dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjelaskan variasi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha. Menurut perspektif teori institusional, pemerintah memainkan peran strategis dalam membentuk lingkungan kelembagaan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi pelaku usaha. Karakter kelembagaan yang kuat yang dibentuk melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan peluang *survival* dan kapabilitas kewirausahaan, sekaligus mendorong pelaku usaha merespons peluang secara lebih efektif dalam lingkungan yang kompetitif (Prasannath et al., 2024). Kebijakan dukungan pemerintah melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan, penyederhaan perizinan, dan fasilitasi teknologi dapat memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengimplementasikan orientasi kewirausahaan secara efektif. Dalam penelitian ini, kebijakan dukungan pemerintah tidak hanya dipahami sebagai konsep yang bersifat umum, melainkan dioperasionalkan ke dalam bentuk intervensi yang konkret dan terukur terhadap pengembangan usaha mikro. Kebijakan tersebut mencakup diantaranya kebijakan pengembangan kapasitas usaha melalui program pelatihan, *workshop*, dan inkubasi bisnis yang bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial dan kewirausahaan pelaku usaha,

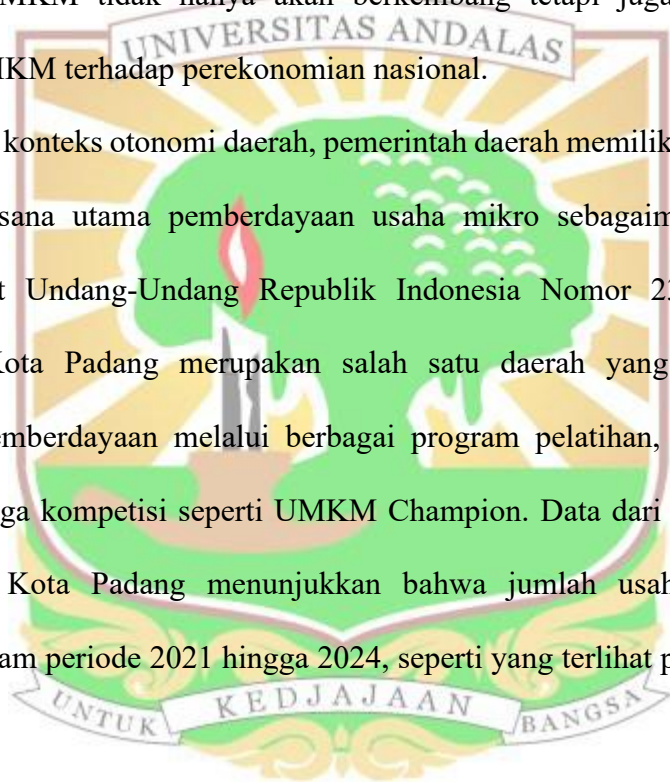
kebijakan akses pembiayaan, seperti fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat permodalan usaha, kebijakan failitasi usaha yang meliputi penyederhanaan perizinan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal, kebijakan pendampingan usaha melalui mentoring dan program pembinaan berkelanjutan seperti inkubasi dan UMKM Champion yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang, serta kebijakan digitalisasi UMKM melalui pelatihan pemasaran digital dan perluasan akses pasar berbasis teknologi.

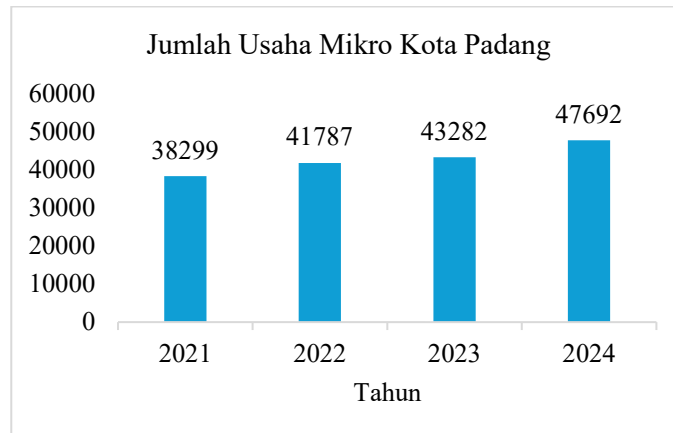
Prasannath et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan dukungan pemerintah tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja UMKM, tetapi juga dapat berperan sebagai mediasi yang menjembatani hubungan antar orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha. Artinya, orientasi kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha akan lebih berdampak terhadap kinerja usaha apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat dan implementatif. Dengan kata lain, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, kemampuan orientasi kewirausahaan pelaku usaha belum tentu mampu menghasilkan peningkatan kinerja secara optimal.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memegang peran strategis dalam pengembangan dan penguatan kinerja UMKM (Alkahtani et al., 2020). Sejalan dengan itu, dukungan pemerintah terhadap dunia usaha juga dipandang sebagai salah satu sumber daya eksternal yang penting karena mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM (Ishtiaq et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Tyas et al. (2020), dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM, sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui kolaborasi yang kuat antar aktor tersebut, diharapkan UMKM tidak hanya akan berkembang tetapi juga meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama pemberdayaan usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu daerah yang saat ini aktif melakukan pemberdayaan melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, inkubasi, hingga kompetisi seperti UMKM Champion. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro terus meningkat dalam periode 2021 hingga 2024, seperti yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini.





Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang (2025)

Gambar 1.1. Jumlah Usaha Mikro di Kota Padang

Dari data diatas dapat terlihat bahwa jumlah usaha mikro di Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tersebut mencerminkan tingginya dinamika kewirausahaan masyarakat serta semakin dominannya peran sektor mikro dalam struktur perekonomian daerah. Namun demikian, pertumbuhan jumlah usaha mikro tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas usaha, terutama dalam penguatan aspek kapasitas manajerial, akses terhadap permodalan, serta keberlanjutan usaha. Upaya tersebut penting agar perkembangan usaha mikro tidak hanya tercermin dari jumlah unit yang meningkat, tetapi juga dari peningkatan produktivitas dan kinerja usaha.

Hingga tahun 2025, tercatat lebih dari 47.000 usaha mikro yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (IKP Diskominfo Kota Padang, 2025). Namun, meskipun jumlah UMKM dan intensitas intervensi kebijakan terus meningkat, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang dinilai siap untuk naik kelas. Hal ini tercermin dari program UMKM Champion, di mana dari ribuan pendaftar, kurang dari satu persen yang berhasil masuk ke tahap inkubasi dan tahap pembinaan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan

antara peningkatan jumlah usaha mikro dan capaian kinerja usaha yang berkualitas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan dukungan pemerintah serta kesiapan internal pelaku usaha dalam mengoptimalkan peluang pengembangan usaha.

Berbagai laporan pemerintah daerah dan kajian akademik menunjukkan bahwa permasalahan mendasar usaha mikro di Kota Padang masih berkisar pada lemahnya inovasi produk rendahnya orientasi pasar, keterbatasan literasi keuangan, serta belum optimalnya pemanfaatan pemasaran digital. Bahkan, meskipun kebijakan dukungan pemerintah telah mencakup aspek pelatihan dan pendampingan yang relatif komprehensif, dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan kinerja usaha mikro secara nyata masih sulit dipetakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh orientasi kewirausahaan pelaku usaha dalam merespons dan memanfaatkan kebijakan tersebut secara efektif.

Permasalahan kinerja tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan struktur sektor usaha mikro di Kota Padang. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, bidang usaha UMKM didominasi oleh sektor kuliner kemasan dan kuliner saji, yang berkembang seiring kuatnya budaya kuliner lokal dan tingginya permintaan pasar. Selain itu, usaha mikro juga banyak bergerak di bidang jasa, ritel, dan juga kerajinan. Sementara itu, kategori usaha lainnya mencakup usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha rumah tangga yang tidak terkategori.

Keberagaman sektor usaha tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro di Kota Padang memiliki karakteristik, tingkat persaingan, serta tantangan kinerja yang berbeda-beda. Perbedaan karakter usaha ini menuntut pendekatan pemberdayaan yang tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing sektor. Oleh karena itu, penguatan kompetensi pelaku usaha melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang telah mengulirkan berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaku usaha. Pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai aspek, antara lain pemasaran digital, literasi keuangan, inovasi bisnis, manajemen usaha, hingga pendampingan bisnis. Data berbagai pelatihan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha UMKM di Kota Padang. Berikut data Tabel 1.1 pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Padang bersama beberapa *stakeholders* dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024 ini.

Tabel 1. 1 Pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Tahun 2021-2024

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Pelatihan
1	Oktober 2021	Pelatihan UMKM Minangkabau bagi Pegiat UMKM Kota Padang yang Bekerjasama dengan JNE
2	Oktober 2021	Pelatihan digital marketing UMKM Kota Padang
3	November 2021	Pelatihan Inkubasi Wirausaha Makanan Kekinian di Bidang Kuliner oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Pelatihan
4	Maret 2022	Pelatihan <i>Digital Marketing</i> oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI)
5	Februari 2022	Pelatihan Kehumasan bertema “ <i>Be a Smart Designer and Writer</i> ”
6	Juni 2022	Sosialisasi Kemudahan Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro
7	Juli 2022	<i>Workshop</i> Pelatihan Usaha Mikro Berbasis Barista oleh Diskop UKM Kota Padang
8	Februari 2023	<i>Digital Entrepreneur Empowerment Program (DEEP)</i> : Pelatihan Dan Pendampingan Bisnis
9	Mei 2023	Pelatihan Kuliner Hantaran oleh Dinas Koperasi UKM Kota Padang
10	Juni 2023	Pelatihan Barber oleh Dinas Koperasi UKM Kota Padang
11	Agustus 2023	Pelatihan Pelaku Usaha Mikro Potensial ”Inovasi Sajian Kuliner Berbasis Pastry dan Boga” Kerjasama Diskop UKM Kota Padang Dengan PT Padang Cipta Mandiri
12	Oktober 2023	<i>Digitalisasi</i> UMKM Kota Padang : Ekspansi Pasar Online
13	Oktober 2023	Pelatihan Pemasaran <i>Digital</i> Bagi Pelaku Usaha Mikro
14	November 2023	Pelatihan <i>Digital Marketing</i> Bagi Pelaku Usaha Binaan Dinas Koperasi & UKM Kota Padang
15	Desember 2023	Pelatihan <i>Digital Marketing</i> Untuk UKM Binaan Dinas Koperasi & UMKM Kota Padang
16	Desember 2023	Pelatihan Pendaftaran Sertifikasi Halal <i>Self-Declare</i> dan Seremonial Penerbitan NIB bagi UMKM Binaan BCA di Sumatera Barat
17	April 2024	Bimbingan Teknis <i>Digital Marketing</i> Bagi Pelaku Usaha UMKM Kota Padang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18	Mei 2024	Pelatihan Pemasaran <i>Digital</i> bagi UMK dan Perkoperasian Bagi Koperasi
19	Juli 2024	Pelatihan Penggunaan <i>Social Media</i> bagi Pelaku Umkm di Kota Padang : Akademi Mudah Ekspor & Diskop UMKM Kota Padang
20	Agustus 2024	Pelatihan Akbar Kepada 1000 Pelaku UKM Terkait Literasi Keuangan dan <i>Digitalisasi</i> yang Dilaksanakan Oleh PNM
21	Agustus 2024	Pelatihan Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan, dan Pemasaran Produk Ramah Lingkungan UMKM Hijau Kota Padang Binaan Bank Indonesia
22	Oktober 2024	Pelatihan UMKM Naik Kelas Bersama PT Pegadaian Cab.Padang & Dinas Koperasi dan UMKM

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Pelatihan
23	November 2024	Pelatihan Peningkatan Skill dan Wawasan <i>Digitalisasi</i> Pelaku Usaha : ”Go <i>Digital</i> Meningkatkan Daya Saing UMKM”

Sumber: Data diolah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang (2025)

Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dari data diatas dapat diklasifikasikan jenis pelatihan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Padang ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Pemasaran *Digital*
2. Literasi Keuangan
3. Pengembangan Keterampilan
4. Inovasi Bisnis
5. Manajemen Usaha

Jika dilihat dari intensitas pelatihan yang telah diselenggarakan pada periode 2021-2024, dapat dilihat bahwa pelatihan terkait pemasaran digital menjadi prioritas utama dalam upaya pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kota Padang. Fokus ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke ranah digital. Hal ini selaras dengan target pemerintah yang mencanangkan 30 juta UMKM terdigitalisasi pada tahun 2024 (Komdigi, 2024). Di sisi lain, pemerintahan saat ini juga terus menekankan pentingnya transformasi UMKM agar dapat naik kelas melalui inovasi dan efisiensi usaha. Lebih lanjut, pemasaran digital yang menjadi fokus utama tersebut dapat diperkuat dengan inovasi bisnis pada UMKM. Dengan menggabungkan pemasaran digital dan inovasi bisnis, UMKM diharapkan tidak hanya mampu memperluas

jangkauan pasar secara daring tetapi juga terus beradaptasi dan menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul.

Namun, hasil survei awal terhadap tiga pelaku usaha mikro bidang kuliner di Kota Padang dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda namun sama-sama pernah mengikuti program kebijakan dukungan pemerintah melalui pelatihan dan pembinaan, mengungkapkan bahwa sebagian besar program masih dinilai terlalu teoretis dan belum menyentuh kebutuhan praktis pelaku usaha. Beberapa pelatihan belum memberikan pendampingan lanjutan yang memadai, sementara akses permodalan dinilai masih terbatas dan belum menyentuh pelaku usaha dengan efektif. Selain itu, pelaku usaha menghadapi kendala dalam menemukan tenaga kerja terampil dan mentor bisnis yang kompeten. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan dampak nyata di lapangan, sehingga efektivitas kebijakan pemerintah daerah masih menjadi tantangan yang signifikan.

Lebih lanjut, keterbatasan efektivitas dari dampak kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan semata, tetapi juga oleh kondisi lingkungan bisnis tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Lingkungan bisnis ini mencakup dinamika persaingan, akses pasar, ketersediaan sumber daya, stabilitas regulasi, serta dukungan kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aktivitas operasional dan strategis UMKM. Pulka et al. (2021) menegaskan bahwa dalam mengelola kinerja usaha, UMKM perlu menyelaraskan sumber daya dan strateginya dengan perubahan lingkungan

eksternal yang terus berkembang, karena lingkungan tersebut memengaruhi operasi, kebijakan, prosedur, serta pengambilan keputusan usaha.

Sejalan dengan pandangan tersebut, orientasi kewirausahaan tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan bisnis yang membentuk peluang maupun keterbatasan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dengan orientasi kewirausahaan yang kuat cenderung lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, namun kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal, kondisi pasar, dan tingkat persaingan yang dihadapi (Yin et al., 2023). Lingkungan eksternal yang kondusif terbukti tidak hanya memperkuat daya saing UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja dan keberlanjutan (Yin et al., 2023). Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa lingkungan bisnis berperan dalam memperkuat hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha. Studi Tajeddini & Mueller (2019), misalnya, menunjukkan bahwa dinamika lingkungan yang tinggi dapat memperkuat manfaat orientasi kewirausahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kajian empiris yang mengintegrasikan peran orientasi kewirausahaan sebagai faktor internal dengan kebijakan dukungan pemerintah sebagai mekanisme pemediasi serta lingkungan bisnis sebagai faktor kontekstual pemoderasi dalam memengaruhi kinerja usaha mikro masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu cenderung menguji hubungan langsung antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha, tanpa mempertimbangkan bagaimana peran dari kebijakan dan dinamika lingkungan bisnis dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama pada usaha mikro di Kota Padang. Analisis yang mengintegrasikan orientasi kewirausahaan, kebijakan dukungan pemerintah sebagai variabel mediasi, dan lingkungan bisnis sebagai variabel moderasi akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme peningkatan kinerja usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kota Padang: Kajian Kebijakan Dukungan Pemerintah sebagai Variabel Pemediasi dan Lingkungan Bisnis sebagai Variabel Pemoderasi"**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diangkat untuk penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan adalah:

1. Bagaimana pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kebijakan dukungan pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan dukungan pemerintah terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang?
4. Bagaimana peran kebijakan dukungan pemerintah dalam memediasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro di Kota Padang?

5. Bagaimana peran lingkungan bisnis dalam memoderasi hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kebijakan dukungan pemerintah.
3. Menganalisis pengaruh kebijakan dukungan pemerintah terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang.
4. Menguji peran kebijakan dukungan pemerintah sebagai variabel mediasi pada hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro di Kota Padang.
5. Menguji peran lingkungan bisnis sebagai variabel moderasi pada hubungan antara apakah orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini penulis berharap hasil penelitian dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan

UMKM. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara orientasi kewirausahaan, kebijakan dukungan pemerintah, lingkungan bisnis, dan kinerja usaha mikro, serta menambahkan pemahaman baru mengenai peran mediasi kebijakan dukungan pemerintah dan peran moderasi lingkungan bisnis dalam hubungan tersebut. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model teoretis serupa, baik dengan menambahkan variabel lain, memperluas wilayah kajian, maupun menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

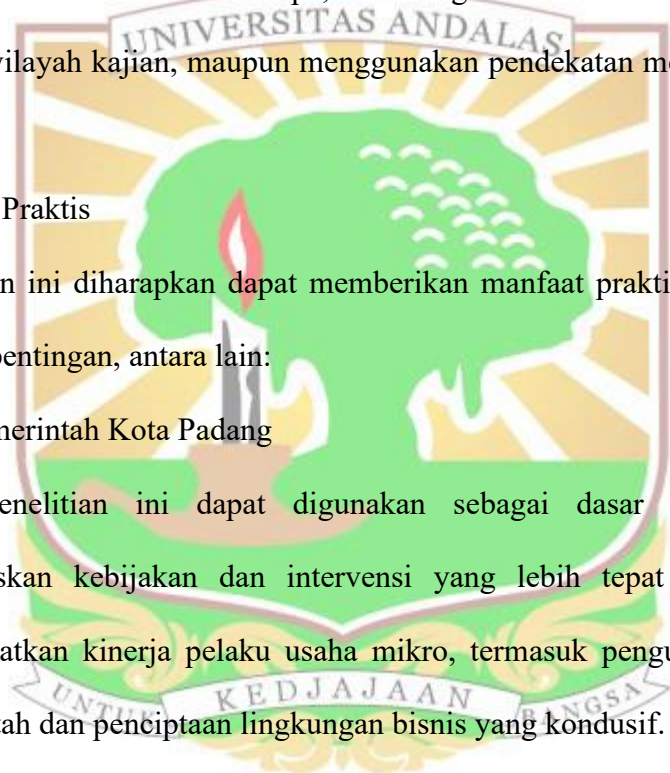
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1) Bagi pemerintah Kota Padang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar empiris dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha mikro, termasuk penguatan dukungan pemerintah dan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif.

2) Bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja usaha, serta bagaimana memanfaatkan dukungan pemerintah dan dinamika lingkungan bisnis untuk meningkatkan performa usaha.



3) Bagi pemangku kepentingan lainnya

Bagi para pemangku kepentingan lain seperti lembaga pendamping UMKM, lembaga pembiayaan, dan komunitas bisnis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merancang program dukungan yang lebih responsif, terarah, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro berdasarkan bukti empiris di Kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup teoretis dan kontekstual berikut ini.

1. Ruang Lingkup Teoretis

Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peran kebijakan dukungan pemerintah sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap peningkatan kinerja usaha mikro, serta bagaimana lingkungan bisnis berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha mikro. Secara keseluruhan, ruang lingkup teoretis penelitian ini mencakup empat variabel, yaitu orientasi kewirausahaan sebagai variabel independen (X), kinerja usaha mikro sebagai variabel dependen (Y) yang diukur dari aspek kinerja keuangan dan non-keuangan, kebijakan dukungan pemerintah sebagai variabel mediasi (Z), serta lingkungan bisnis sebagai variabel moderasi (M).

2. Ruang Lingkup Kontekstual

Penelitian ini dibatasi pada konteks pelaku usaha mikro di Kota Padang yang terdaftar pada instansi pemerintah daerah dan/atau terlibat dalam program

pelatihan/pembinaan UMKM. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja usaha dalam kondisi nyata di lapangan, dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan bisnis lokal serta bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang melalui kebijakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti yang dijelaskan secara ringkas dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, objek penelitian, populasi dan penentuan sampel penelitian, operasionalisasi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta *software* yang digunakan pada penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya mengenai pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Padang dengan kebijakan dukungan pemerintah sebagai

variabel mediasi dan lingkungan bisnis sebagai variabel moderasi. Bab ini juga memuat teori maupun penelitian sebelumnya, serta implikasi dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi penelitian dan saran untuk penelitian kedepannya.

